

**SINERGI POTENSI, PROGRAM, DAN ANGGARAN: SUATU UPAYA
AKSELERASI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN**
*(The Synergy of Potency, Program, and Budget: an Acceleration Initiative
of Reducing Poverty and Unemployment)*

Ika Rahutami dan Rini Hastuti
UNIKA Soegijapranata Semarang

ABSTRACT

Regional development needs economic potential, program and budget synergy. Based on theory and best practice from other regions, stated that the synergy of economic potential, program and budget are important to reduce poverty and unemployment. This research is purposed to (i) analyze priority sector based on actual economic potential and condition; (ii) Analyze the gap between actual economic potential and condition with mentioned program in RKPD; (iii) analyze budget performance; and (iv) Evaluate the gap between programs and budgeting. This research was conducted in Semarang and Wonosobo regencies. Qualitative and quantitative analysis were used to test budget performance by using value for money concept or triple E (economic, effective and efficient). The analyzed data for Semarang indicated that the dominant sectors are agriculture, industry and trade. General evaluation of budgeting program showed that there was unsynchronized data in poverty measurement. This condition caused the budgeting process related to the reduction of poverty and unemployment became difficult. The positive finding was most of the analyzed activity programs were economic and efficient. Unfortunately, there was less available data related to the outcome. The data of Wonosobo showed that agriculture is the dominant sector. The budget performance showed that there weren't plenty idea about option for the poor and unemployment. Fragmentation in the inception of budgeting also caused activities being intended for poverty and unemployment reduction became very limited. It was found that Wonosobo was good evaluated with triple E aspect.

Keywords: *Synergy, potency, program, budgeting*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang baik dan kestabilan harga di Jawa Tengah tidak dapat serta merta memberikan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di segala aspek. Salah satu

indikator yang paling sederhana dari kondisi masyarakat adalah pendapatan per kapita masyarakat, terciptanya lapangan kerja dan menurunnya jumlah penduduk miskin. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Jawa Tenga periode 2003-2007.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran di Jawa Tengah 2003-2007

Tahun	Jumlah		Prosentase	
	Miskin	Penganggur	Miskin	Penganggur
2003	6,980,000	912,513	21.78	5.66
2004	6,843,800	1,299,220	21.11	7.72
2005	6,533,500	1,446,404	20.49	8.51
2006	7,100,600	1,356,909	22.19	8.20
2007	6,557,200	1,360,219	20.43	7.77
2008	6,189,600	1,227,308	19.23	7.35
2009*	7,281,800	1,121,820	17.72	6.42

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2010)

Pembangunan daerah membutuhkan sinergi potensi, program, dan anggaran. Selama ini pemerintah daerah cenderung untuk tidak memperhatikan sinergi antara potensi ekonomi, program, dan pengangguran. Berdasarkan teori dan *best practice* dari wilayah yang lain keterkaitan ketiga hal tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, permasalahan utama yang terjadi di Jawa Tengah adalah kurang adanya sinergi antara potensi, program, dan anggaran. Dengan menurunkan dari rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (i) melakukan analisis sektor prioritas berdasarkan potensi dan kondisi ekonomi aktual di kabupaten/kota terpilih, (ii) menganalisis kesenjangan antara potensi dan kondisi ekonomi aktual dengan program terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran dalam RKPD, (iii) melakukan analisis terhadap kinerja anggaran atas program atau kegiatan indikatif dengan konsep *value for money* dan (iv) melakukan evaluasi kesenjangan antara program terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan anggaran.

BAHAN DAN METODE

Mengingat keterbatasan waktu dan dana, maka tidak seluruh program

terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran di semua kabupaten/kota di Jateng akan dievaluasi. Program terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang akan dievaluasi adalah: Kesehatan, sosial, tenaga kerja, koperasi dan UKM, Pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pemilihan obyek penelitian selanjutnya ditentukan berdasarkan hasil penelitian Rizki dan Saleh (2007) yang menggolongkan tipologi kemiskinan dan pendapatan perkapita di Jawa Tengah. Kemudian dipilih dengan kriteria sebagai berikut:

- Pendapatan perkapita di atas rata-rata dan kemiskinan di bawah rata-rata: Karanganyar, Kudus, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kab. Semarang. Kabupaten yang akan dipilih adalah Kabupaten Semarang karena kedekatan akses dan mewakili sektor industri.
- Pendapatan perkapita di bawah rata-rata dan kemiskinan di atas rata-rata: Blora, Grobogan, Sragen, Wonogiri, Kebumen, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Rembang, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal. Kabupaten yang dipilih adalah Kabupaten Wonosobo karena mewakili sektor pertanian.

Data sekunder yang dikumpulkan melalui Metode Dokumentasi dan *Focus*

Group Discussion yang digunakan dalam penelitian, meliputi:

- a) Kondisi Ekonomi PDRB sektoral di masing-masing kabupaten/kota, komposisi sektoral di masing-masing kabupaten, investasi, arus perdagangan, jumlah sekolah, jumlah rumah sakit, panjang jalan, angka kemiskinan, angka pengangguran,
- b) Dokumen terkait penyusunan dan realisasi APBD, yaitu RKPD, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPPA SKPD), APBD, Perubahan APBD, Realisasi APBD, dan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIP) pemda Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode analisis, yaitu:

1. Studi Eksplorasi: dilakukan untuk menggali potensi daerah kabupaten. Indikator ekonomi yang diharapkan muncul dari studi ini adalah besarnya PDRB, Pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks gini, indeks pemberdayaan gender, indeks pembangunan gender, tingkat melek huruf, dan tingkat kematian ibu hamil. Indikator kinerja pembangunan yang akan digunakan terdiri dari indikator ekonomi dan sosial yang dijabarkan dalam 13 indikator dan bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan Kabupaten/Kota.
2. *Gap Analysis*: dilakukan untuk menganalisis kesesuaian dan/atau sinergi program dalam RKPD,

terhadap program yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD.

3. Analisis kualitatif terhadap:
 - a) Program/ kegiatan, untuk mengevaluasi ketepatan program/ kegiatan atas kondisi riil atau potensi masing-masing daerah.
 - b) Anggaran, untuk mengevaluasi ketepatan pengalokasian anggaran untuk program-program terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
4. Analisis kuantitatif terhadap anggaran, untuk menguji kinerja anggaran daerah dengan konsep *value for money*, dimana ukuran keberhasilan program yang tercermin dalam anggaran akan dinilai berdasarkan faktor ekonomis (rupiah realisasi terhadap rupiah anggaran), efisien (*output* kegiatan terhadap *input* kegiatan), dan efektif (*outcome* kegiatan terhadap *output* kegiatan).

HASIL

Secara ringkas, hasil penelitian untuk masing-masing Kabupaten, digambarkan dalam tabel 2 dan tabel 3 pada halaman lampiran. Tabel tersebut menginformasikan bahwa Kabupaten Semarang memiliki keunggulan di sektor industri, perdagangan, rumah makan dan jasa komunikasi, dan pertanian. Terkait program yang dijalankan dengan menggunakan dana APBD sehubungan dengan pengurangan kemiskinan dan pengangguran Kabupaten Semarang hanya mengalokasikan dana yang kecil, dan bahkan kegiatan yang dilakukan juga tidak selalu sinergis atau sesuai dengan potensi yang dimiliki. Evaluasi 3E atas anggaran yang dilakukan memperlihatkan anggaran yang digunakan adalah ekonomis dan efisien. Dimana rata-rata realisasi sama dengan yang dianggarkan. Tidak ada data pendukung yang dapat dikumpulkan terkait *outcome* kegiatan,

sehingga tingkat efektifitas kegiatan tidak dapat diketahui.

Hasil olah data kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki daerah terletak pada pertanian, restoran, dan jasa-jasa. Namun sayangnya program-program yang dilaksanakan terkait pengentasan kemiskinan dan pengangguran tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya tersebut, misalnya program yang dilaksanakan justru terkait dengan kewirausahaan, modal kerja bagi buruh gendong, kuli, padat karya produktif, teknologi tepat guna. Evaluasi anggaran dengan 3E menunjukkan bahwa kinerja anggaran adalah bagus, dalam arti semua yang direalisasikan sama dengan yang direncanakan berdasarkan aspek ekonomis, efisien, dan efektif.

PEMBAHASAN

Hasil analisis data di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa berdasarkan lapangan kerja, industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang menyerap paling banyak tenaga kerja per tahunnya, kemudian diikuti dengan pertanian dan perdagangan, rumah makan dan hotel. Perekonomian di Kabupaten Semarang didominasi oleh sektor pertanian, industri, dan perdagangan, rumah makan dan jasa komunikasi. Krisis finansial pada tahun 2008 tidak langsung membuat mereka mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan. Malahan pada tahun 2008 hanya terdapat 20 kasus PHK dengan jumlah tenaga kerja yang diberhentikan kerja berjumlah 44 orang. Satu tahun kemudian barulah keputusan untuk memberhentikan sejumlah tenaga kerja dilakukan. Sebanyak 4.847 orang kehilangan pekerjaan. Uniknya lagi jumlah itu hanya berasal dari 23 kasus saja. Bila dibandingkan dengan data pada tahun 2008 hal ini sangat diluar perkiraan.

Evaluasi umum terhadap proses penganggaran program terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran menunjukkan bahwa permasalahan utama terkait berjalannya program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi adalah adanya ketidaksinkronan data dalam pengukuran kemiskinan. kegiatan-kegiatan yang tidak bersinggungan dan berdampak langsung dengan kemiskinan dan pengangguran justru memiliki alokasi yang lebih besar dari pada kegiatan yang murni untuk masyarakat miskin dan pengangguran. Namun demikian, berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, Pemerintah Kab. Semarang memiliki upaya untuk mensinergikan data kemiskinan. Pelibatan pihak swasta melalui CSR dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kondisi di Kab. Semarang.

Hal positif yang ditemukan adalah sebagian besar kegiatan yang dianalisis mempunyai tingkat ekonomis 100%, yang berarti realisasi anggaran sama dengan yang dianggarkan. Semua kegiatan yang dianalisis menghasilkan keluaran seperti yang telah dianggarkan (angka efisien realisasi selalu sama dengan angka efisien anggaran), namun sebagian besar kegiatan tidak menyediakan data yang cukup terkait hasil (*outcome*) yang dicapai. Sehingga sangat sedikit kemudian yang bisa dianalisis tingkat efisiensinya.

Hasil analisis Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2009 sebanyak 40,76% penduduk berada di garis kemiskinan. Jumlah ini lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 43,75%. Menurunnya kemiskinan tidak menyudahi permasalahan sosial. Kasus PHK yang terjadi di Kabupaten Wonosobo tidak

mengalami peningkatan di tahun 2009 hanya saja dari 4 kasus PHK ada 178 orang yang kehilangan pekerjaan. Angka ini lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu meningkat 87,07% dari tahun 2008. Dari sisi penawaran, PDRB tahun 2009 mengalami perkembangan yang baik. Secara keseluruhan PDRB tumbuh sebesar 7,03%. Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yakni sebesar 47,42%, sektor yang memberikan kontribusi terkecil ialah sektor pertambangan dan penggalan sebesar 0,59%.

Hasil analisis kinerja anggaran Kabupaten Wonosobo ditemukan bahwa tidak cukup banyak gagasan mengenai keberpihakan terhadap kemiskinan dan pengangguran menjadi roh dalam penyusunan anggaran. Fragmentasi di awal penyusunan anggaran juga menyebabkan anggaran yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran menjadi sangat kecil. Fragmentasi dari awal tidak memungkinkan menjadikan kemiskinan sebagai prioritas anggaran karena masing-masing anggaran telah dipatok dengan prosentase tertentu. Terlihat juga kecenderungan bahwa program yang diusulkan dari bawah lebih banyak berwujud fisik, bukan kegiatan yang bersifat kegiatan yang mendorong naiknya kualitas SDM seperti: sekolah, pelatihan, pendidikan dan lain-lain. Hal yang tampak jelas, di Kab. Wonosobo yang memiliki sektor potensial pertanian, justru tidak terdapat SMK yang memberikan konsentrasi pertanian. Alasan SMK untuk tidak membuka jalur pertanian karena sedikitnya peminat. Padahal disadari kalau Kab. Wonosobo akan berkembang di sektor pertanian, maka dibutuhkan tenaga kerja terampil yang mampu menangani pertanian secara baik. Dari sisi kinerja ekonomis, efektif

dan efisien, penganggaran di Kabupaten Wonosobo telah cukup baik.

PENUTUP

Hasil analisis data di Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa berdasarkan industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang menyerap paling banyak tenaga kerja per tahunnya, kemudian diikuti dengan pertanian dan perdagangan, rumah makan dan hotel. Perekonomian di Kabupaten Semarang didominasi oleh sektor pertanian, industri, dan perdagangan, rumah makan dan jasa komunikasi.

Evaluasi umum terhadap proses penganggaran program terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran menunjukkan bahwa permasalahan utama terkait berjalannya program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi adalah adanya ketidaksinkronan data dalam pengukuran kemiskinan. kegiatan-kegiatan yang tidak bersinggungan dan berdampak langsung dengan kemiskinan dan pengangguran justru memiliki alokasi yang lebih besar dari pada kegiatan yang murni untuk masyarakat miskin dan pengangguran. Namun demikian, berdasarkan hasil FGD yang dilakukan, Pemerintah Kab. Semarang memiliki upaya untuk mensinergikan data kemiskinan. Pelibatan pihak swasta melalui CSR dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kondisi di Kab. Semarang.

Hasil analisis Kabupaten Wonosobo menunjukkan Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB yakni sebesar 47,42%, sektor yang memberikan kontribusi terkecil ialah sektor pertambangan dan penggalan sebesar 0,59%. Analisis kinerja anggaran Kabupaten Wonosobo ditemukan bahwa tidak cukup banyak gagasan mengenai keberpihakan terhadap kemiskinan dan

pengangguran menjadi roh dalam penyusunan anggaran. Fragmentasi di awal penyusunan anggaran juga menyebabkan anggaran yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran menjadi sangat kecil. Fragmentasi dari awal tidak memungkinkan menjadikan kemiskinan sebagai prioritas anggaran karena masing-

masing anggaran telah dipatok dengan prosentase tertentu. Terlihat juga kecenderungan bahwa program yang diusulkan dari bawah lebih banyak berwujud fisik, bukan kegiatan yang bersifat kegiatan yang mendorong naiknya kualitas SDM seperti: sekolah, pelatihan, pendidikan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga Jakarta.
- Gau, Sukardi. 2001. Kemiskinan dan Otonomi Daerah, www.kaltimpostonline
- Insukendro, (November 2001, download), Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta 1984-1987 , www.psi.ut.ac.id
- Loehr, William, Manasan, Rosario, Briefing Note For Consulting Assistance on Economic Reform II Discussion Paper No. 38 Fiscal Decentralization and Economic Efficiency: Measurement and Evaluation, www.hiid.harvard.edu
- Mahsun, Mohamad, dkk. 2006. Akuntansi Sektor Publik. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta.
- Nugraha, Eva Putra. 2009. Audit Sektor Publik. 13 Juli 2009 <http://evaputranugraha.wordpress.com/2009/07/13/audit-sektor-publik/> diunduh tanggal 30 Juli 2010.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Engelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Poister, Theodore H. 2003. *Measuring Performance in Public and Nonprofit Organization*. Jossey-Bass A Willey Imprint.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2001. Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi, Per Pod, Jakarta
- Suryahadi, Asep, Sudarno Sumarto, (November 2001, download). Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia, www.smeru.or.id
- Todaro, Michael P., Smith, Stephen C., 2003, *Economic Development*, (Eighth edition) Addison Wesley www.elsppat.or.id, didownload pada Maret 2010
- _____, Kabupaten Wonosobo dalam Angka, Badan Pusat Statistik
- _____, Jawa Tengah dalam Angka, Badan Pusat Statistik
- _____, Kabupaten Semarang dalam Angka, Badan Pusat Statistik
- _____, Konsep dan pengertian desa siaga, diunduh pada 31 Juni 2010 dari <http://www.slideshare.net/BJSGS-DP/konsep-amp-pengertian-desa-siaga>

Lampiran:

Tabel 2. Ringkasan Analisis Kabupaten Semarang

KONDISI	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	KEKUATAN	KELEMAHAN	SARAN
Sektor Unggulan: 1. Industri 2. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Komunikasi 3. Pertanian Komoditas Unggulan: 1. Madu 2. Minuman Kesehatan 3. Eceng Gondok 4. Kerajinan Kesen Hal-hal baik di Semarang: 1. Jumlah penduduk miskin menurun 2. PDRB menunjukkan peningkatan 3. Tingkat inflasi menurun 4. Produksi Tabaka meningkat Hal-hal lemah di Semarang: 1. Tingkat pengangguran masih tinggi 2. Mayoritas penduduk berpendidikan rendah	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masy Pendidikan, Pelatihan, konseling bagi gakin, anak terlantar, penyandang cacat, eks trauma Terwujudnya sarana dan prasarana sumber air bersih pedesaan yg memadai Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, network 	<ul style="list-style-type: none"> Pelibatan masyarakat sasaran secara tepat Tingkat ekonomis < 100% tahun 2007: 5 dari 8 kegiatan; tahun 2008: 2 dari 6 kegiatan Tingkat efisiensi realisasi sama dengan yang dianggarkan 	Masih belum dapat diukur efektifitasnya. Tidak tersedia data terkait hasil (outcome) yang dapat diukur baik dari yang dianggarkan maupun yang direalisasikan.	Perlu dilakukan pemberdayaan network dengan dunia usaha melalui kegiatan produktif yang melibatkan masyarakat miskin
	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> info bursa tenaga kerja Pendidikan & pelatihan ketrampilan, dan kewirausahaan Penyusunan data base tenaga kerja daerah Pengembangan, pengendalian, pembinaan, pemantauan lembaga Standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja Fasilitasi perselisihan hubungan industrial Fasilitasi dan pengawasan: perlindungan dan penegakan hukum, serta jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ttg ketenagakerjaan 	Pelibatan masyarakat sasaran (pihak-pihak yang terikat) secara tepat	<ul style="list-style-type: none"> realisasi anggaran untuk kegiatan bagi lembaga penyalur, industri, dan para pekerja > realisasi kegiatan bagi pencari kerja. Dunia industri di kab semarang sendiri justru lebih banyak merekrut angkatan kerja dari luar kabupaten Terdapat tiga kegiatan indikatif yang berjalan tidak cukup efisien Penyerapan realisasi dana terbesar ada pada kegiatan yang justru tidak bersinggungan dan berkepentingan langsung dengan pencari kerja. Belum tertanganinya pengangguran musiman. 	<ul style="list-style-type: none"> Perlu adanya tindak lanjut setelah kegiatan pendidikan dan pelatihan, misalnya dengan penyaluran tenaga kerja. Perlu studi banding ke Batam untuk mengetahui karakteristik kebutuhan secara lebih detail kebutuhan tenaga kerja Kegiatan pelatihan bagi pencari kerja sehingga mencapai standar rekrutmen industri Perlu diadakan kegiatan untuk menangani pengangguran musiman.
	Koperasi & UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah 	<ul style="list-style-type: none"> meski bersifat tidak langsung, urusan ini tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar kegiatan tidak menyentuh langsung pada masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> SKPD terkait sebaiknya memiliki fokus untuk pengembangan komoditas unggulan yaitu adu, minuman kesehatan, enceng gondok, dan kerajinan keset. Pengembangan koperasi dan UMKM

KONDISI	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	KEKUATAN	KELEMAHAN	SARAN
3. Kasus PHK meningkat 4. Belum ada penyuluhan bagi UMKM 5. Rata-rata biaya kebutuhan hidup minimum menunjukkan peningkatan		kewirausahaan	kemiskinan dan pengangguran		yang bergerak di bidang komoditas unggulan sebaiknya diberi fasilitas mulai dari pelatihan tentang manajemen, pengembangan produk, pemasaran, akses finansial.
	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan obat Pembekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin Pemberian tambahan makanan dan vitamin. Perawatan berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu. 	<ul style="list-style-type: none"> 2 kegiatan tingkat ekonomis < 100% kegiatan berlangsung efisien 	<ul style="list-style-type: none"> sebagian besar kegiatan lebih berorientasi pada masyarakat luas dan bersifat perbaikan sarana dan prasarana hanya 4 dari 356 kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat miskin terdapat 2 kegiatan yang tidak efektif kegiatan yang berjalan ekonomis justru mengurangi porsi anggaran pada tahun berikutnya. total realisasi anggaran untuk kegiatan indikatif pada tahun 2008 < 2007 terdapat kegiatan yang tidak efektif 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan pengobatan untuk masyarakat miskin sebaiknya terus dilakukan karena mengingat biaya kesehatan yang semakin mahal Pemberdayaan puskesmas sebagai rujukan pengobatan utama masyarakat miskin

Sumber: Data diolah

Tabel 2. Ringkasan Analisis Kabupaten Wonosobo

KONDISI	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	KEKUATAN	KELEMAHAN	SARAN
Sektor unggulan 1. Pertanian 2. Restoran 3. Jasa-Jasa Komoditas Unggulan: 1. Gula Kelapa 2. Pandebsi/ Alsinta 3. Kayu Olahan 4. Keripik Jamur Hal-hal baik di Wonosobo: 1. Sektor pertanian berkembang dengan baik 2. Jumlah penduduk miskin menurun 3. Tingkat inflasi menurun 4. PDRB menunjukkan peningkatan 5. PMA sudah masuk di Kabupaten Wonosobo Hal-hal lemah di Kab. Wonosobo: 1. Penduduk mayoritas berpendidikan rendah 2. Penduduk rawan sosial makin banyak 3. Tenaga kerja yang terkena PHK meningkat 4. Belum ada penyuluhan bagi UMKM 5. Belum ada PMDN di Kabupaten Wonosobo 6. Luas lahan reboisasi menurun 7. Jumlah pengangguran bertambah	Pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • pemugaran rumah miskin • Fasilitasi Tim Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) • PNPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan indikatif terdukung dengan program PNPM dari pusat • 3 dari 5 kegiatan mempunyai tingkat ekonomis < 100%. • Semua kegiatan indikatif: efisien dan efektif • Cost sharing dengan APBN dan APBD I membuat kegiatan ini tidak membebani anggaran belanja daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mempunyai data penduduk miskin riil 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan penduduk miskin riil • Keseimbangan kegiatan indikatif bersifat fisik dan non fisik • Bangun dan pemberdayaan networking dengan pihak swasta • Pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian: SDM, fasilitas/ sarana sehingga sektor pertanian menjadi hal menarik untuk dikembangkan bagi semua pihak
	ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • pelatihan dan peningkatan keterampilan pencari kerja (termasuk AKAD) • perluasan pengembangan kesempatan kerja melalui : padat karya produktif dan tek. Tpt guna • peningkatan pelayanan transmigrasi • penanganan dan penyelesaian kasus TKI bermasalah 	<ul style="list-style-type: none"> • adanya transfer tenaga kerja antar daerah • pelatihan peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja • penyedia tenaga kerja baik untuk luar negri, luar propinsi, maupun luar kabupaten yang sebagian besar tidak bermasalah • Tahun 2007 bisa menekan anggaran • Mencapai tingkat efisien dan efektif seperti yang dianggarkan • Kegiatan pelatihan, dan penyiapan pencari kerja sudah terselenggara 	<ul style="list-style-type: none"> • masih mempunyai kasus TKI bermasalah • tingkat efektif di tahun 2008 tidak tercapai untuk kegiatan padat karya. • tidak ada data tentang seberapa banyak pencari kerja yang ada bisa tersalurkan ke dunia kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari data spesifikasi kebutuhan tenaga kerja dari sumber penerima angkatan kerja daerah • Adanya tindak lanjut setelah kegiatan pelatihan bagi pencari kerja sehingga efektifitas kegiatan lebih bisa terukur
	Koperasi dan UMKM	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan • Fasilitas modal kerja dan pemantauan dana utk ekonomi Produktif, buruh gendong, kuli panggul, LKM KSM, KUB, UMKM • Pemberdayaan, pengembangan (promosi), dan pembinaan KUKM, industri RT, industri kecil, dan industri menengah • Penunjang Pendampingan program prospek mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Semua kegiatan mencapai tingkat ekonomis, efisien, dan efektif sama seperti yang telah dianggarkan • Melakukan kegiatan untuk kelompok indikatif meski bersifat tidak langsung • Mempunyai kegiatan pengembangan kewirausahaan dan memfasilitasinya 		<ul style="list-style-type: none"> • pelatihan dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan dengan komoditas unggulan • Diadakan kegiatan fisik dan non fisik untuk masyarakat miskin

KONDISI	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN	KEKUATAN	KELEMAHAN	SARAN
	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Program desa siaga: pelatihan, stimulan, pembinaan, pengembangan desa siaga pelayanan kesehatan, penyediaan dana pendamping, mitra obat untuk masyarakat miskin, Pemberdayaan puskesmas: rawat inap, pembinaan keluarga rawan, resiko tinggi pelatihan kader penjaringan dan penanganan gizi buruk, PMT pengadaan bibit ternak utk anak terlantar, lansia bantuan utk panti asuhan, orsos penyandang cacat, ex-rehabilitasi, anak nakal, anjal, anak terlantar. Lansia 	<ul style="list-style-type: none"> pemberdayaan puskesmas sebagai rujukan utama pengobatan bagi masyarakat miskin kegiatan banyak berhubungan/ pemberdayaan puskesmas, yang biasanya menjadi rujukan pertama masyarakat miskin. Dengan asumsi seluruh masyarakat tidak mampu mendapat pengobatan yang semestinya, maka jika realisasi kegiatan pengobatan masyarakat tidak mampu hanya sebesar 73% mengindikasikan masyarakat miskin dalam kondisi yang sehat. kegiatan yang bersifat bantuan terbukti tidak berjalan efektif (hasil/ outcome) realisasi sangat lebih kecil dari yang dianggarkan. Berlakunya konsep desa siaga yang nenberdayakan dan memandirikan masyarakat Terdapat kegiatan jamkesmas yang membantu masyarakat miskin melakukan pengobatan 	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan indikatif hanya berjumlah 24, dari 407 kegiatan yang diselenggarakan terkait urusan kesehatan masih banya kegiatan yang bersifat pembangunan fisik Tidak tersedia data masyarakat miskin yang pasti, sehingga realisasi anggaran Obat bagi keluarga tidak mampu hanya 73% saja terdapat kegiatan yang semestinya bukan menjadi urusannya (bantuan ternak) 	<ul style="list-style-type: none"> tidak melakukan kegiatan yang bukan urusannya semakin menjangkau masyarakat miskin untuk kegiatan bantuan pengobatan, misal jamkesmas. pemberdayaan/ fasilitasi puskesmas sebagai rujukan utama masyarkat miskin Kegiatan bantuan lebih bersifat kegiatan produktif.
	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Organisasi Sosial dan panti asuhan penertiban tuna sosial 	<ul style="list-style-type: none"> Mempunyai tingkat ekonomis, efisien, dan efektif seperti yang telah dianggarkan 	<ul style="list-style-type: none"> hanya ada 2 kegiatan indikatif 	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan pembinaan, pelatihan, pengembangan SDM baik pengelola maupun masyarakat sasaran